

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JULIANTO AKSANANDA PRATAMA PUTRA
NPP. 31.0593

Asdaf Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Kebijakan Publik
Email: 31.0593@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Umar Nain, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The development and improvement of district roads are priorities in Sanggau district's infrastructure, with the presence of adequate district roads having an impact and benefit for the people of Sanggau district. Purpose:* *The aim of this research is to evaluate the policy of development and improvement of district roads in Sanggau district Method:* *The methods used in the research are interviews, observations, and documentation. And through the analysis of public policy evaluation, the success of that policy is determined. Result:* *In the implementation of the development and repair policy of district roads in Sanggau district, it can be said that it does not run well or smoothly. Conclusion:* *The regional development policy in the field of infrastructure, development and repair of district roads in Sanggau district, West Kalimantan province, which is contained in the 2019-2024 Sanggau district RPJMD, has not run as it should, based on the policy goal, which is to facilitate the lives of the people of Sanggau district. Keywords:* *Development, Improvement, Policy Analysis, District Roads*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten merupakan prioritas pembangunan infrastruktur di kabupaten Sanggau, dengan kehadiran jalan kabupaten yang layak maka dapat memberikan dampak serta manfaat bagi masyarakat kabupaten Sanggau. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten di kabupaten Sanggau. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan dengan menggunakan analisis evaluasi kebijakan publik menentukan keberhasilan kebijakan tersebut **Hasil/Temuan:** Dalam implementasi kebijakan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten di kabupaten Sanggau bisa dikatakan bahwa tidak berjalan dengan baik atau lancar. **Kesimpulan:** Kebijakan pembangunan daerah dalam bidang infrastruktur pembangunan serta perbaikan jalan kabupaten di kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat yang tertuang pada RPJMD kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 belum berjalan sebagaimana mestinya berpatokan dengan tujuan kebijakan yaitu memudahkan kehidupan masyarakat kabupaten Sanggau. **Kata kunci:** Pembangunan, Perbaikan, Analisis kebijakan dan Jalan Kabupaten

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 menjelaskan peran jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam berbagai bidang pemerintahan maupun digunakan oleh masyarakat sebagai sarana prasarana atau fasilitas negara dalam membantu kehidupan sehari-hari, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Dari segi ekonomi, jalan merupakan infrastruktur yang memfasilitasi pergerakan barang dan orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dari aspek sosial dan budaya, keberadaan jalan dapat mendorong interaksi antara masyarakat. Di berbagai tempat berbeda untuk menjalin komunikasi yang penting bagi kehidupannya juga dapat digunakan untuk menciptakan pemukiman baru dalam menambah populasi, dalam konteks politik, jalan memainkan peran sebagai penghubung antara suatu daerah dengan daerah lainnya, dan dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, jalan adalah akses penting dalam menjalankan sistem pertahanan dan keamanan. Di Kabupaten Sanggau signifikansi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan jalan. Hal ini didukung oleh Ketua DPRD Kab. Sanggau, Jumadi, S.Sos dilansir dari Warta Pontianak. Dalam pembangunan daerah terutama infrastruktur jalan yang merupakan nadi kehidupan masyarakat Kabupaten Sanggau, memang masih terdapat kekurangan yaitu permukaan jalan bukanlah aspal sehingga menjadi faktor penghambat transportasi. Hal ini berbanding lurus dengan data jalan di Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

Tabel 1.1 Permukaan Jalan di Kabupaten Sanggau

Kondisi Jalan (Conditions of Roads)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Baik/ <i>Good</i>	132,28	45,08	72,70	77,44	113,34	83,00
Sedang/ <i>Moderate</i>	292,49	399,96	300,07	330,61	258,64	288,15
Rusak/ <i>Damage</i>	378,50	414,56	272,96	471,49	361,37	447,08
Rusak Berat/ <i>Severely Damage</i>	198,18	141,84	355,71	121,90	268,10	183,22
Jumlah/ <i>Total</i>	1.001,44	1.001,44	1.001,44	1.001,44	1.001,44	1.001,44

Di dalam gambar tersebut diterangkan bagaimana kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Sanggau yang sebagian besar didominasi oleh jalan yang memiliki permukaan kerikil dan tanah, bahkan terhitung dari tahun 2019 permukaan jalan aspal terus mengalami penurunan dengan indikasi kerusakan jalan kabupaten. Sementara itu, untuk kondisinya sendiri belum menyentuh persentase 10% dari total jalan kabupaten yang diklasifikasikan sebagai jalan dengan kondisi baik atau layak digunakan oleh masyarakat. Hal ini merupakan kondisi yang tidak wajar dimana harusnya pemerintah daerah menggunakan APBD sebagai dana pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, akan tetapi bukannya perkembangan malahan kerusakan terus terjadi dari tahun ke tahun.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berkurangnya lahan terbuka hijau, dewasa ini tentunya sangat terasa sekali bahwa bumi yang kita tinggali ini perlahan-lahan mengalami pemanasan global ekstrem yang mengakibatkan lapisan ozon bumi semakin menipis seiring berjalannya waktu, hal ini

menyebabkan kekurangan pasokan oksigen yang lebih cepat menguap. Dengan hadirnya lahan terbuka hijau tentunya membantu mengurangi pemanasan global yang terjadi dengan cara menyerap zat-zat beracun untuk kemudian diolah menjadi oksigen yang bisa dinikmati manusia. Tetapi, dikarenakan pemerintah semakin gencar juga dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur maka terjadilah pengurangan lahan terbuka hijau yang sesungguhnya menjadikan produksi oksigen menjadi semakin menipis.

1.3 Penelitian Terdahulu

Wotulo, F. L., Gamaliel, H., & Maradesa, D. (2021). Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado. Menjelaskan bahwa mekanisme pengumpulan dan pembayaran pajak restoran selama pandemi COVID-19 masih sama seperti pada waktu sebelum pandemi COVID-19. Target penerimaan pajak restoran selama pandemi COVID-19 berubah dengan penurunan 57% dari target induk. Adapun realisasi penerimaan pajak restoran selama pandemi.

Muhammad, N. (2020). Pengaruh Restorasi Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro (2012-2019). Menjelaskan bahwa variabel independen Pajak Restoran (X1) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), sementara Pajak Hotel (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Secara simultan, uji F menunjukkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Dari perspektif ekonomi Islam, penarikan pajak di Kota Metro belum selaras dengan prinsip keadilan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai dalam peningkatan pendapatan daerah belum mencapai dari target yang diharapkan, Ini disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kurang efisiennya pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada.

Nugrahadi, R. (2018). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor apa saja yang harus dipersiapkan secara efisien untuk mengelola pajak properti, yaitu regulasi pelaksanaan, sumber daya manusia, sarana infrastruktur, dan anggaran yang ada. Jadilah sisi faktor, strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu memetakan nilai jual objek tanah, update objek data pajak, pemberian prime layanan, mengumpulkan dengan struktur, dan memberikan informasi secara keseluruhan skala.

Hendri, J., & Farida, L. (2013). Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak properti kabupaten Siak dengan menerapkan strategi agresif dengan menggunakan cara berpikir pemerintah, yaitu memanfaatkan segala daya untuk merebut dan memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dan dengan menerapkan pajak tersebut untuk memanfaatkan kekuatan sanksi potensi pasar, dan meningkatkan pengawasan untuk memanfaatkan dan memanfaatkan diseminasi kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan kampanye yang dilakukan daerah.

Putri, I. S., Setiawati, B., & Rijali, S. (2020). Optimalisasi Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabalong telah melakukan intensifikasi untuk

meoptimalisasikan pendapat pajak dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap peraturan pajak daerah kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Amelia, D., & RFS, H. T. (2016). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan oleh UPTD Dinas Pendapatan Mandau sub Bengkalis dalam kategori kurang maksimal hal ini dikarenakan masih adanya wajib pajak yang tidak terdaftar serta subjek dan objek pajak properti perdesaan dan perkotaan yang seharusnya dicatat namun nyatanya belum dicatat oleh UPTD Pendapatan Daerah dalam proses melakukan pembayaran kebingungan wajib pajak dan mengakibatkan pembayaran tidak dilakukan tepat waktu.

Simba, N., Baga, L. M., & Rachmina, D. (2022). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi. Melemahnya kondisi ekonomi di tengah pandemi saat ini dapat mengakibatkan penurunan persentase pembayaran pajak bumi dan bangunan, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak dan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masyarakat.

Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik. Adanya hambatan dalam pemungutan PBB-P2 mengakibatkan kurang maksimalnya pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik, hal ini dapat terlihat dari belum tercapainya target PBB-P2 setiap tahunnya. Optimalisasi adalah upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan realisasi PAD.

Irianto, R. D., Bharata, A. W., Saputro, R., & Pratiwi, I. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Hasil penelitian pada desa-desa di kecamatan Reban melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data primer/sekunder, observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan telah menemukan faktor penyebabnya, diantaranya: (1) Persepsi tentang PBBP2; (2) Menurunnya kepercayaan masyarakat; (3) Hambatan pemungutan pada WP diluar wilayah

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu kebijakan pembangunan daerah terutama dalam infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah:

1. Menganalisis proses kebijakan pembangunan daerah terutama dalam infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten di Kabupaten Sanggau
3. Menganalisis dampak pembangunan daerah terutama dalam infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau..

II. METODE

Aturan praktis bagi peneliti adalah melakukan pekerjaan mereka dengan keunggulan dan akurasi. Arikunto (2019:136) menyatakan bahwa strategi adalah teknik utama yang diteripakn peneliti dalam mencapai tujuan serta mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan

yang diangkat. Dalam pembagiannya pendekatan penelitian dibagi menjadi 3 macam yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, serta *mix method* atau gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. penulis memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menafsirkan secara langsung keadaan yang ada dilapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) dihasilkan dengan melihat fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pengalaman, partisipan penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dalam suatu setting alam tertentu secara menyeluruh dan melalui deskripsi verbal dan tertulis. dan dengan menggunakan berbagai teknik. Menurut (Sugiyono, 2019) yaitu “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu”. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Memulai penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data: yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian yang berdasarkan fakta keadaan alam yang bersifat natural dalam kehidupan sosial seseorang Dalam menggunakan penelitian kualitatif dibutuhkan data atau informasi seperti teks hasil wawancara, catatan ketika berada dilapangan, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan lain (foto, data dari sumber lain atau internet, dan lain-lain). Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Bidang Infrastruktur Pembangunan Serta Perbaikan Jalan Kabupaten Di Kabupaten Sanggau

Dalam teori evaluasi kebijakan oleh Edwards III, G. C. (2023) digambarkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan publik dapat dianalisis dari beberapa aspek yaitu tujuan program, analisis masalah, standarisasi program, tingkatan perubahan, alasan perubahan, dan indikator keberadaaan dampak. Penulis menemukan beberapa fakta terkait penelitian ketika melaksanakan proses wawancara yang memvalidasi dokumen-dokumen terkait kebijakan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten di Kabupaten Sanggau. Dokumen yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.

Tujuan Program

Tujuan program adalah indikator awal pada teori evaluasi kebijakan oleh Edwards III, G. C. (2023) yang memiliki pengertian menganalisa tujuan pembentukan sebuah kebijakan publik dibandingkan dengan hasil beserta dampak kebijakan di lapangan. kebijakan tersebut bertujuan memudahkan kehidupan masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan dan mensejahterakan masyarakat. Tetapi, sesuai yang dikatakan oleh Bapak H. Imran, ST bahwasannya kenyataan atau realisasi di lapangan belum bisa menggapai tujuan tersebut dengan maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan observasi peneliti di lapangan dimana masih terdapat banyak jalan kabupaten dengan kondisi jalan yang rusak dan tidak layak digunakan oleh masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan program pada kebijakan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten di Kabupaten Sanggau belum mencapai target atau belum memenuhi tujuan yaitu memudahkan kehidupan masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan dan mensejahterakan masyarakat.

Analisis Masalah

Analisis masalah merupakan indikator berikutnya yang membahas tentang permasalahan utama dalam sebuah kebijakan atau lebih ringkasnya membicarakan tentang kendala di dalam sebuah kebijakan. Permasalahan ini dibahas mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan dengan tujuan menemukan sumber utama kendala agar dalam perencanaan kebijakan berikutnya hal tersebut dapat diatasi. Tonase jalan wajib diketahui sebelum melakukan pembangunan maupun perbaikan jalan, hal ini dimaksudkan agar jalan baru dapat bertahan dengan lama dan tidak mudah mengalami kerusakan. Apalagi dengan kontur tanah di kabupaten Sanggau yang rawan longsor membutuhkan konstruksi jalan khusus agar tidak mengalami kerusakan parah dan dapat berdampak buruk terhadap transportasi maupun mobilisasi di kabupaten Sanggau.

Standarisasi Kebijakan

Dalam sebuah kebijakan publik diperlukan pedoman yang menjadi patokan pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini dimaksudkan agar kebijakan publik memiliki standar jelas atas suatu kebijakan sehingga proses evaluasi dapat dilaksanakan untuk mengukur dampak, efektivitas, efisiensi sampai dengan kekurangan. Penyesuaian standarisasi yang dilakukan merupakan penurunan kualitas jalan yang menjadi patokan, dimana semula harusnya terbuat dari aspal serta beton diturunkan kualitasnya dengan bahan tanah yang dipadatkan. Sebetulnya hal ini memang lumrah saja karena kembali lagi ada 2 unsur yang harus disesuaikan agar pembangunan juga perbaikan jalan dapat memenuhi standar. Tetapi, malahan penyesuaian tersebut menjadi *boomerang* untuk masyarakat, karena konstruksi jalan aspal beton sangatlah berbeda dengan tanah.

Tingkatan Perubahan

Seperti sudah disampaikan pada indikator tujuan kebijakan yang mana kebijakan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten memiliki tujuan memudahkan kehidupan masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan juga mensejahterakan masyarakat. Untuk menganalisis hal tersebut peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa warga untuk mengetahui pandangan mereka pada pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten di kabupaten Sanggau. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan pembangunan dan perbaikan kedua ruas jalan kabupaten tersebut dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan Bapak Timotius Hasanudin serta Bapak Sakti Wiguna. Betapa bersyukur mereka dengan perkembangan infrastruktur jalan kabupaten pada masa sekarang yang mempermudah segala urusan masyarakat di kecamatan. Peneliti pun dapat menyimpulkan betapa vitalnya pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten di kabupaten Sanggau, yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Penyebab Perubahan Yang Terjadi

Perubahan merupakan sebuah keadaan yang merubah kondisi awal menjadi kondisi terkini, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalamnya. Dalam sebuah kebijakan juga perlu diperhatikan berbagai perubahan yang terjadi disaat kebijakan tersebut ditetapkan, diimplementasikan sampai dengan evaluasinya, peneliti harus dapat menganalisis apakah kebijakan yang ditetapkan menjadi faktor utama perubahan yang terjadi. Hal ini agar efektivitas dan efisiensi kebijakan dapat diukur serta mendapatkan tindak lanjut berikutnya yang dapat berdampak pada masyarakat. Kabupaten Sanggau memang merupakan salah satu daerah di provinsi Kalimantan Barat yang menjadi penghubung utama antar kabupaten, tidak mengherankan ramainya pengendara berlalu-lalang setiap harinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam indikator kelima ini peneliti melihat bahwa setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki dampaknya masing-masing serta memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat.

Indikator Penentuan Dampak

Dan indikator terakhir yaitu indikator penentuan dampak yang memiliki pengertian yaitu metrik atau parameter yang digunakan untuk mengukur hasil atau efek dari suatu

kebijakan atau program. Indikator ini membantu dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan dampaknya terhadap masyarakat atau lingkungan. Dengan kata lain indikator yang terakhir ini memiliki hubungan dengan tujuan kebijakan dan dampak kebijakan kepada masyarakat.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Permasalahan yang terdapat pada kebijakan pembangunan daerah dalam bidang infrastruktur pembangunan serta perbaikan jalan kabupaten di kabupaten Sanggau adalah topografi, biaya dan pemerataan. Ketiga permasalahan inilah yang menyebabkan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten di kabupaten Sanggau, Bappeda beserta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Sanggau bekerja sama dalam mengatasi ketiga permasalahan tersebut. Temuan penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian Wotulo, F. L., Gamaliel, H., & Maradesa, D. (2021) yaitu terkait topografi, biaya dan pemerataan

IV. KESIMPULAN

Kebijakan pembangunan daerah dalam bidang infrastruktur pembangunan serta perbaikan jalan kabupaten di kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat yang tertuang pada RPJMD kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 belum berjalan sebagaimana mestinya berpatokan dengan tujuan kebijakan yaitu memudahkan kehidupan masyarakat kabupaten Sanggau. Hal ini dapat disimpulkan dari 6 indikator evaluasi kebijakan oleh Edward Suchman yang sebagian besar indikatornya bisa dinilai belum memenuhi dan belum optimal, Contohnya saja dalam indikator standarisasi kebijakan yang harus menyesuaikan beberapa aspek seperti topografi dan biaya sehingga menjadikan standarisasi kebijakan memiliki kualitas menurun.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga tidak maksimal dalam menemukan hasil.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan kebijakan pembangunan daerah terutama dalam infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Sanggau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantudan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Amelia, D., & RFS, H. T. (2016). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. *Universitas Riau Pekanbaru*. [Garuda - Garba Rujukan Digital \(kemdikbud.go.id\)](http://Garuda-GarbaRujukanDigital.kemdikbud.go.id)
- Arikunto S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hendri, J., & Farida, L. (2013). Optimalisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(2), 208-212. [OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN | Hendri | Jurnal Administrasi Pembangunan \(unri.ac.id\)](http://OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN | Hendri | Jurnal Administrasi Pembangunan (unri.ac.id))
- Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN

- PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GRESIK. *Publika*, 503-514. [OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN \(PBB-P2\) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GRESIK | Publika \(unesa.ac.id\)](#)
- Irianto, R. D., Bharata, A. W., Saputro, R., & Pratiwi, I. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 5(2), 1-8. [OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 DI WILAYAH KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG | RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang \(batangkab.go.id\)](#)
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, N. (2020). *PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO (2012-2019)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). [SKRIPSI 2.pdf \(radenintan.ac.id\)](#)
- Nugrahadi, R. (2018). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 36-40. [Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | Jurnal Ilmiah Administrasi Publik](#)
- Putri, I. S., Setiawati, B., & Rijali, S. (2020). Optimalisasi Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 3(1), 81-94. [OPTIMALISASI INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN \(PBB-P2\) OLEH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Di KABUPATEN TABALONG | JAPB \(stiatabalong.ac.id\)](#)
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1(2). [OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN \(PBB\) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH \(STUDI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN \(PBB\) DI KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH\) | Rahmawan | Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal \(ulm.ac.id\)](#)
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Simba, N., Baga, L. M., & Rachmina, D. (2022). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 57-64. [Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi | Simba | Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis \(upi.edu\)](#)
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. Bandung: Alfabeta.
- Wotulo, F. L., Gamaliel, H., & Maradesa, D. (2021). Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(1), 207-215. [Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado | Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum \(Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum\) \(unsrat.ac.id\)](#)
- Edwards III, G. C. (2023). *Why the Electoral College is bad for America*. Cambridge University Press.

Peraturan

UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan

UU No. 13 Tahun 1980 menjelaskan peran jalan

